

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jelas terlihat bahwa dalam evolusi umat manusia koneksi antara berbagai belahan dunia semakin erat. Meskipun definisi negara (*nation state*) mengalami perubahan akibat keterhubungan tersebut, negara masih berfungsi sebagai entitas utama dalam interaksi internasional. Negara tidak bisa menghindari pengaruh yang semakin besar yang muncul dari setiap perkembangan yang terjadi di dunia. Hal ini berimplikasi pada hubungan internasional (*foreign relations*) yang dijalankan oleh masing-masing negara. Dalam konteks global saat ini, Indonesia menjalin kerjasama dengan hampir seluruh bangsa di dunia serta berbagai organisasi internasional yang signifikan. Dari semua hubungan tersebut, bisa dikatakan bahwa saat ini hubungan Indonesia-Amerika Serikat adalah salah satu yang paling krusial. Ini tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa AS merupakan negara dengan pengaruh besar dan adikuasa (Suryohadiprojo 3 April 2006, 298-299).

Hubungan Indonesia dan AS merefleksikan sebuah kemitraan yang dinamis dan adaptif. Kerangka kerja samanya telah berlangsung sejak hadirnya para pedagang AS di Hindia Belanda yang kemudian disahkan melalui pembukaan kantor konsulernya di Batavia pada tanggal 24 November 1801. Hubungan ini semakin kukuh setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945 dan kemunculannya sebagai sebuah negara demokratis di kawasan Asia Tenggara.

Selanjutnya, pada tahun 1949, setelah Indonesia mendapatkan pengakuan penuh atas kedaulatannya dari Belanda, inisiatif untuk memperkuat ikatan antara kedua bangsa resmi dimulai dengan pembukaan kantor Kedutaan Besar AS di Jakarta yang dipimpin oleh H. E. Horace Merle Cochran sebagai Duta Besar pertama. Pembukaan ini diikuti oleh didirikannya kantor Kedutaan Besar Indonesia di Washington D. C. pada 20 Februari 1950, dengan H. E. Dr. Ali Sastroamidjojo menjabat sebagai Duta Besar pertama.

Indonesia dan AS telah menjalin hubungan bilateral dalam kurun waktu yang panjang. Meskipun hubungan diplomatik kedua negara telah terjalin secara resmi, perkembangannya tidak selalu berlangsung tanpa hambatan. Sebagaimana hubungan antarnegara pada umumnya, interaksi antara Indonesia dan AS juga mengalami dinamika yang ditandai oleh periode peningkatan maupun penurunan kerja sama. Salah satu peristiwa yang memberikan dampak kurang menguntungkan bagi Indonesia terjadi ketika pemerintah AS menerapkan kebijakan embargo terhadap persenjataan militer Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Kebijakan tersebut menyebabkan terbatasnya akses Indonesia terhadap kebutuhan dan pengembangan sektor pertahanan. Namun demikian, meskipun hubungan politik kedua negara mengalami penurunan akibat kebijakan embargo tersebut, kerja sama di bidang perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap menunjukkan tren peningkatan.

Indonesia sebagai negara menengah di Asia berusaha untuk mengatur dan mengarahkan dinamika kekuatan global sesuai dengan pandangan mereka terhadap tatanan dunia. Sejak awal masa kemerdekaan, Indonesia telah terlibat

secara aktif dengan negara-negara besar. Keterlibatan ini menunjukkan ambisi negara menengah Asia untuk menjaga kemandirian mereka dalam arena politik internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia semakin aktif memperkuat perannya di tingkat regional melalui pengajuan konsep Indo-Pasifik kepada berbagai aktor dan pemangku kepentingan di kawasan. Inisiatif tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai peluang yang tersedia sekaligus meminimalkan risiko yang muncul akibat persaingan antara negara-negara besar. Melalui pendekatan ini, Indonesia berupaya mendorong terbentuknya tatanan kawasan yang mengedepankan keterbukaan, inklusivitas, serta kerja sama yang konstruktif di bidang keamanan dan ekonomi. Dengan demikian, kepentingan negara-negara berkekuatan menengah diharapkan tetap terakomodasi di tengah dinamika dan perubahan geopolitik global yang terus berkembang (Andrena 2025, 5).

Kebijakan luar negeri AS yang sering dikaitkan dengan praktik dominasi global telah menjadi salah satu isu yang banyak dibahas dalam kajian hubungan internasional. Persepsi tersebut turut memengaruhi pandangan Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara-negara besar. Dalam konteks kerja sama internasional, Indonesia pada beberapa periode menunjukkan kecenderungan untuk mempererat hubungan dengan Tiongkok, yang dipandang sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan Asia. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, muncul berbagai pandangan yang memperkirakan adanya perubahan dinamika hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Hal ini berkaitan dengan sejumlah kebijakan yang ditempuh Indonesia, antara lain peningkatan kerja sama

ekonomi dengan Tiongkok serta langkah pemerintah untuk mengambil alih kepemilikan mayoritas saham PT Freeport Indonesia hingga mencapai 51 persen. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya Indonesia dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus menunjukkan arah kebijakan luar negeri yang lebih berorientasi pada kepentingan nasional (Andrena 2025, 26-28).

Pergantian pemerintahan di AS sering kali diikuti oleh perubahan orientasi dan prioritas kebijakan luar negeri. Kondisi ini menimbulkan berbagai implikasi bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang harus menyesuaikan strategi diplomatiknya terhadap dinamika kebijakan AS. Pada dasarnya, kebijakan luar negeri Amerika Serikat dirumuskan untuk melindungi kepentingan nasional serta mempertahankan pengaruh strategisnya dalam sistem internasional. Selama masa pemerintahan Trump, kebijakan yang diterapkan cenderung berfokus pada penguatan ekonomi dengan mendorong pertumbuhan, menekan tingkat pengangguran, serta memperkuat hubungan ekonomi dengan negara mitra. Sementara itu, pada era pemerintahan Joe Biden, pendekatan yang digunakan lebih menekankan kerja sama multilateral melalui diplomasi, penguatan aliansi dengan negara-negara demokratis, promosi nilai-nilai hak asasi manusia, serta dukungan terhadap pembangunan ekonomi global sebagai upaya memperkuat posisi AS dalam tatanan internasional (Andrena 2025, 26-28).

Pemilihan Presiden AS tahun 2020 yang diselenggarakan pada 3 November 2020 menghasilkan kemenangan bagi Joe Biden, kandidat dari Partai Demokrat, yang berhasil mengungguli petahana Donald J. Trump dari Partai Republik. Biden dinyatakan sebagai pemenang setelah memperoleh lebih dari 270 suara elektoral,

yaitu jumlah minimum yang diperlukan untuk memenangkan pemilihan presiden di AS. Dalam sistem pemilihan tersebut, seorang kandidat harus meraih sedikitnya 270 dari total 538 suara elektoral yang tersedia untuk dapat terpilih sebagai presiden. Dengan perolehan suara yang melampaui ambang batas tersebut, Joe Biden secara resmi memenangkan kontestasi pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2020 (Dedy Jusnar Hendrawan 2021, 20-21).

Perbedaan mendasar antara Trump dan Biden terletak pada pendekatan yang digunakan dalam menjalankan kebijakan luar negeri AS. Trump cenderung mengutamakan kerja sama bilateral, sedangkan Biden lebih menekankan pentingnya pendekatan multilateral dalam hubungan internasional. Salah satu wujud dari pendekatan tersebut adalah komitmen Biden untuk mengembalikan AS sebagai anggota *Paris Agreement* setelah sebelumnya keluar pada masa pemerintahan Trump. Biden juga menegaskan bahwa pemerintahannya akan memperkuat kerja sama dengan negara-negara mitra, sekutu, serta negara-negara yang memiliki kesamaan pandangan dalam berbagai isu global. Bagi Indonesia, kepemimpinan Biden diharapkan mampu menciptakan stabilitas dan kepastian geopolitik, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang menjadi arena persaingan strategis antara AS dan Tiongkok. Stabilitas politik dan keamanan kawasan merupakan aspek penting bagi Indonesia dalam menjaga kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, hubungan yang lebih konstruktif antara AS dan Tiongkok diharapkan dapat memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepastian dan ketenangan di kawasan, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-

negara Indo-Pasifik dan anggota ASEAN secara keseluruhan (Dedy Jusnar Hendrawan 2021, 20-21).

Fase kepemimpinan Presiden Joe Biden, hubungan bilateral antara Indonesia-AS memasuki fase baru yang ditandai dengan intensitas dan komprehensivitas kerjasama yang meningkat. Puncak dari kemajuan ini adalah keputusan bersejarah pada November 2023 untuk menaikkan status kemitraan dari Kemitraan Strategis menjadi Kemitraan Komprehensif Strategis (*Comprehensive Strategic Partnership/CSP*). Peningkatan status ini secara jelas menunjukkan pengakuan AS terhadap Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sebagai mitra yang sangat penting dan sentral di kawasan Indo-Pasifik. Secara geopolitik, Washington memandang Jakarta sebagai jangkar stabilitas di Asia Tenggara. AS memberikan dukungan penuh terhadap prinsip-prinsip Sentralitas ASEAN dan menggarisbawahi komitmennya pada kerangka kerja Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka, yang sejalan dengan Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik yang dipimpin oleh Indonesia. Kerjasama keamanan pun diperkuat, mencakup peningkatan dialog dan latihan bersama untuk mengatasi tantangan regional, seperti menjaga stabilitas di Laut Tiongkok Selatan.

Pada sektor ekonomi, fokus utama diarahkan pada pembangunan kerjasama yang substansial. Pemerintahan Biden berupaya keras untuk mendorong investasi AS di berbagai sektor strategis Indonesia, termasuk proyek-proyek vital seperti energi bersih, infrastruktur, kesehatan, dan teknologi, seiring upaya Indonesia menuju transisi energi dan ekonomi digital. Dalam konteks perdagangan, Indonesia turut mendorong negosiasi menuju *Limited Trade Deal* (LTD) untuk

menciptakan akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan volume perdagangan bilateral. Selain isu strategis dan ekonomi, kedua negara juga memperdalam dialog mengenai isu-isu global yang mendesak, seperti kerjasama mitigasi perubahan iklim dan penguatan nilai-nilai demokrasi, menegaskan bahwa kemitraan ini berlandaskan pada kepentingan strategis dan nilai-nilai bersama. Secara keseluruhan, era Joe Biden menandai sebuah momentum di mana hubungan Indonesia-AS menjadi jauh lebih erat, terstruktur, dan strategis, memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci yang tak terpisahkan dari strategi AS dalam mempromosikan perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik (Hadi 2023).

Setelah berakhirnya masa pemerintahan Biden, Trump kembali memenangkan pemilihan presiden AS dengan mengusung slogan *America First*. Kembalinya Trump ke tampuk kekuasaan menandai berlanjutnya orientasi kebijakan yang menempatkan kepentingan nasional AS sebagai prioritas utama. Dalam konteks perdagangan internasional, kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara memiliki potensi untuk memengaruhi kondisi ekonomi negara mitra, terutama apabila kebijakan tersebut mengarah pada praktik proteksionisme. Kebijakan proteksionis yang diterapkan AS, seperti pemberlakuan tarif impor yang lebih tinggi serta pengetatan regulasi perdagangan, berpotensi memengaruhi hubungan perdagangan dengan berbagai negara, termasuk Indonesia. Dampak dari kebijakan tersebut dapat tercermin pada perubahan neraca perdagangan, penurunan arus ekspor, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya turut memengaruhi stabilitas dan kinerja perekonomian Indonesia.

Prinsip nasionalisme ekonomi dan proteksionisme yang tercermin dalam slogan *America First* menjadi salah satu fondasi utama kebijakan ekonomi AS pada masa pemerintahan Trump. Melalui berbagai pernyataan resminya, Trump menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan diarahkan untuk melindungi tenaga kerja, industri, dan kepentingan ekonomi domestik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat AS. Kembalinya Trump sebagai Presiden AS menandai penguatan kembali orientasi kebijakan ekonomi yang lebih proteksionis, yang berpotensi memberikan dampak terhadap dinamika perdagangan internasional, termasuk bagi Indonesia sebagai salah satu mitra dagang AS. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah keputusan pemerintahannya untuk tidak melanjutkan implementasi *Inflation Reduction Act* (IRA) yang sebelumnya diperkenalkan pada masa pemerintahan Joe Biden. Kebijakan tersebut dipandang dapat memengaruhi arah investasi, perdagangan internasional, serta hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan negara-negara mitranya.

Kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh AS berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Dampak tersebut antara lain muncul melalui peningkatan tarif impor, keputusan AS untuk keluar dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP), serta penghentian implementasi *Inflation Reduction Act* (IRA). Berbagai kebijakan tersebut dapat mengurangi daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional, menurunkan minat investasi, serta meningkatkan tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, sektor-sektor yang bergantung pada ekspor, seperti industri manufaktur dan komoditas nikel, berisiko mengalami penurunan permintaan akibat perubahan kebijakan

perdagangan global. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menghambat kinerja sektor riil dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia (Andrena 2025, 34-39).

Dalam ranah hubungan internasional, Indonesia telah membangun hubungan yang baik dengan hampir seluruh negara di dunia serta dengan berbagai organisasi internasional yang memiliki peran penting. Indonesia juga menjalin hubungan diplomatik yang konstruktif dengan AS dan Tiongkok, yang merupakan dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Meskipun demikian, hubungan perdagangan antara kedua negara tersebut menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan. Ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok mulai meningkat sejak tahun 2018, pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Pada periode tersebut, Trump berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah tegas terhadap Tiongkok yang dinilai merugikan kepentingan ekonomi dan politik AS. Salah satu faktor utama yang memicu konflik dagang tersebut adalah tingginya defisit perdagangan AS terhadap Tiongkok. Pada tahun 2018, defisit perdagangan AS dengan Tiongkok tercatat mencapai sekitar 419,5 miliar dolar AS (World Trade Organization 2019).

Perang dagang antara AS dan Tiongkok mulai berlangsung pada tahun 2018, ketika Presiden Donald J. Trump menetapkan kebijakan pengenaan tarif impor terhadap berbagai produk asal Tiongkok yang dinilai merugikan kepentingan ekonomi AS. Sebagai bentuk respons, Tiongkok kemudian menerapkan kebijakan balasan berupa tarif impor terhadap sejumlah produk asal AS. Dalam implementasinya, AS mengenakan tarif impor bernilai miliaran dolar

terhadap berbagai komoditas dari Tiongkok, termasuk produk-produk teknologi tinggi. Sebagai reaksi, Tiongkok juga memberlakukan tarif impor terhadap sejumlah komoditas pertanian dan peternakan dari AS, seperti kedelai, jagung, dan daging babi. Ketegangan tersebut semakin meningkat seiring dengan tuduhan AS yang menyatakan bahwa Tiongkok melakukan pencurian teknologi dan rahasia dagang, meskipun tuduhan tersebut dibantah oleh pihak Tiongkok. Perang dagang tersebut tidak memberikan dampak langsung terhadap nilai tukar rupiah. Akan tetapi, Indonesia tetap merasakan dampak tidak langsung melalui terjadinya fluktuasi nilai tukar mata uang, mengingat posisinya sebagai bagian dari jaringan perdagangan di kawasan Asia. Dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Singapura dan Malaysia, dampak perang dagang terhadap Indonesia relatif lebih terasa. Kondisi ini turut berkontribusi terhadap pelemahan nilai tukar rupiah, yang salah satunya dipengaruhi oleh dominasi penggunaan dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional serta praktik penundaan pembayaran dalam sejumlah kegiatan perdagangan (Cinta Rahmi 2024, 6-8).

Sektor perekonomian Indonesia memerlukan dukungan ekonomi internasional guna menunjang pertumbuhan ekonomi domestik yang cenderung melambat akibat keterbatasan infrastruktur dan minimnya ketersediaan lapangan kerja. Kerangka kerja sama internasional yang dijalankan Indonesia menggunakan pendekatan non-blok yang menekankan prinsip kerja sama ekonomi secara bebas tanpa keberpihakan pada satu kekuatan tertentu. AS dan Tiongkok berperan sebagai mitra dagang utama Indonesia dalam kegiatan ekspor dan impor, khususnya pada komoditas bahan baku serta produk nonmigas. Kebijakan

proteksionisme yang diterapkan oleh kedua negara tersebut memicu perlambatan ekonomi global yang kemudian memberikan dampak berantai terhadap negara-negara di sekitarnya. Efek domino dari kebijakan proteksi Tiongkok terlihat dari meluasnya dampak ekonomi ke berbagai negara kawasan, mulai dari Kamboja, Vietnam, hingga Indonesia (Sitorus 2021, 193).

Indonesia terkena dampak dari perang dagang antara AS dengan Tiongkok, karena AS menerapkan kebijakan pengenaan tarif tambahan untuk barang Indonesia yang diimpor ke AS. Kebijakan tersebut diterapkan oleh AS karena Presiden Trump memperlakukan kebijakan non-tarif yang diterapkan oleh Indonesia, seperti kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di banyak sektor, perizinan impor yang buruk, hingga program Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan perusahaan sumber daya alam (SDA) untuk menyimpan pendapatan ekspor di rekening dalam negeri. Pada tanggal 2 April, Presiden AS yaitu Donald J. Trump baru saja mengumumkan pajak tarif resiprokal baru untuk 90 negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Amerika Serikat yang bertujuan untuk meningkatkan impor produk-produk AS demi mempersempit surplus perdagangan dengan negara-negara tersebut. Dengan dikeluarkannya kebijakan tarif resiprokal baru oleh AS tersebut pastinya mendapatkan beragam reaksi dari beberapa negara salah satunya Indonesia, dimana Indonesia dikenakan tarif sebesar 32% terhadap produk asal Indonesia, ini pastinya akan berpengaruh ke neraca perdagangan (The White House 2025).

Tarif resiprokal dari AS tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 9 April 2025. Pemberlakuan tarif resiprokal AS memberikan dampak yang signifikan

terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Misalnya, jika Indonesia mengekspor barang-barang seperti tekstil atau elektronik ke Amerika Serikat dengan tarif 32%, Harganya akan meningkat. Akibatnya, konsumen Amerika cenderung membeli produk internasional atau lokal dengan harga lebih rendah. Ini pasti akan menyebabkan volume ekspor Indonesia ke Amerika Serikat menurun, yang berdampak langsung pada neraca perdagangan Indonesia. Jika ekspor menurun, nilai neraca perdagangan Indonesia dapat mengalami defisit yang semakin melebar, yang berarti lebih banyak barang yang diimpor daripada barang yang diekspor (White House 2025).

Data tersebut dapat menunjukkan bahwa tingkat ekspor di Indonesia masih berada pada titik yang cukup tinggi dengan rata rata pendapatan diantara 15000-25000 juta USD, ini menandakan bahwa ekspor di Indonesia masih sangat tinggi. Bisa kita lihat kembali di gambar tersebut bahwa Ekspor di Indonesia meningkat menjadi tertinggi dalam tiga bulan sebesar 23249,20 juta dolar AS pada bulan Maret dari 21944,20 juta dolar AS pada bulan Februari 2025. Ekspor di Indonesia rata-rata sebesar 5767,64 Juta USD dari tahun 1960 hingga 2025, mencapai rekor tertinggi sebesar 27928,70 Juta USD pada Agustus 2022 dan rekor terendah sebesar 30,00 Juta USD pada Januari 1961 (The White House 2025). Dari data prediksi tersebut dapat kita lihat bahwa setelah adanya pengumuman tarif oleh Trump, tingkat ekspor Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan yang signifikan dari yang awalnya berada di titik 23000 juta USD menjadi 21500 juta USD atau sebesar 8% dari bulan Maret dan sekitar 3% dari bulan Februari hal ini mungkin terjadi karena tarif tersebut akan memengaruhi harga jual dari produk

Indonesia yang akan dijual di AS yang pastinya akan menjadi mahal dan membuat para importir mengurangi volume pesanan. Kebijakan kenaikan tarif untuk produk impor dari negara Indonesia sebesar 32% yang ditetapkan oleh negara AS akan mengakibatkan produk komoditas yang di ekspor menjadi tidak dapat bersaing dibanding negara lain seperti Vietnam, Kamboja, dan Tiongkok karena harga barang yang berasal dari Indonesia akan lebih mahal di bandingkan negara lain. Oleh karena hal tersebut produsen mengurangi keuntungan yang mereka dapatkan atau lebih buruknya produsen akan berhenti ekspor ke AS (Dwinanta 2025, 140-142)

Transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024 menandai momentum penting untuk mengevaluasi kontinuitas dan perubahan dalam politik luar negeri Indonesia. Periode transisi ini menjadi sangat signifikan mengingat pendekatan diplomasi yang berbeda antara kedua pemimpin, di mana Jokowi dikenal dengan fokusnya pada pembangunan infrastruktur domestik dan pragmatisme ekonomi, sementara Prabowo memiliki latar belakang militer dan jaringan politik internasional yang lebih luas (Setiawan 2025, 2). Analisis terhadap aktivitas diplomatik Presiden Prabowo Subianto selama periode awal kepemimpinannya menunjukkan intensitas yang luar biasa dalam diplomasi presidensial. Data dari RSIS Singapore mengungkapkan bahwa sejak pemilihan umum Februari 2024 hingga September 2024, Prabowo telah melakukan 84 pertemuan dengan pejabat dari 38 negara, baik dalam setting domestik maupun luar negeri, dengan interaksi paling sering dengan pejabat dari

Amerika Serikat, Tiongkok, Turki, Australia, dan Malaysia (Fadhil Haidar 2021, 152-153).

Pemerintah Negara Indonesia membahas mengenai kebijakan kenaikan tarif impor oleh AS dalam forum Sarasehan Ekonomi yang dilaksanakan pada 8 April 2025. Pemerintah Indonesia dalam forum tersebut berencana untuk mengkombinasikan strategi diplomatik antar negara, konsensi ekonomi Indonesia, dan Reformasi regulasi, hal tersebut dilakukan guna mengurangi dampak yang muncul dari kebijakan kenaikan tarif impor yang dilakukan oleh AS selagi Indonesia memperkuat ekonomi negara agar lebih mandiri dan menjaga dan memperkuat hubungan perdagangan bilateral antar negara (Dwinanta 2025, 140).

Kesepakatan antara Indonesia dan AS dalam konteks ini dapat dipandang sebagai bentuk penguatan kepentingan AS sendiri. Isu yang mengemuka salah satunya adalah tekanan dari AS agar Indonesia mencabut pembatasan ekspor mineral strategis, terutama nikel yang memiliki peran penting sebagai bahan baku utama dalam industri baja tahan karat. Kebijakan pembatasan ekspor nikel yang diterapkan Indonesia dinilai oleh AS sebagai hambatan perdagangan yang merugikan pelaku industri baja di negara tersebut. Selain itu, hubungan ekonomi Indonesia dengan perusahaan baja asal Tiongkok melalui skema investasi *Belt and Road Initiative* juga dianggap sebagai faktor yang berpotensi mengganggu posisi dominan industri baja AS di pasar internasional. Dalam konteks tersebut, American Iron and Steel Institute secara tegas menyatakan harapan agar *Office of the United States Trade Representative* terus memberikan tekanan kepada Indonesia untuk membuka kembali ekspor nikel serta mengevaluasi kebijakan

perdagangan yang dinilai menghambat mekanisme pasar. Di sisi lain, kebijakan pelarangan ekspor nikel yang diterapkan Indonesia memiliki tujuan strategis untuk memperkuat proses hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Apabila tekanan dari AS tersebut berhasil diimplementasikan, maka Indonesia berpotensi kehilangan kontrol atas sumber daya strategisnya sekaligus mengurangi peluang jangka panjang dalam pengembangan industri logam nasional yang mandiri dan berdaya saing tinggi (Meita Rosa 2025, 13).

Saat ini ditengah evolusi koneksi global yang tak terhindarkan, hubungan bilateral antara Indonesia dan AS tetap menjadi poros strategis yang berdenyut, ditandai oleh sejarah panjang kerja sama dan ketegangan dari dukungan kemerdekaan hingga embargo militer. Indonesia, sebagai negara menengah yang ambisius, secara konsisten berupaya mengarahkan dinamika kekuatan global, terbukti dari inisiatif Indo-Pasifik yang menuntut keterbukaan dan inklusivitas. Namun, kedatangan era Donald J. Trump dengan slogan "*American First*" telah mengubah diplomasi menjadi arena konfrontasi yang brutal. Ancaman tarif resiprokal 32% pada produk Indonesia, yang dipicu oleh isu sensitif seperti kewajiban penyimpanan devisa ekspor dan larangan ekspor nikel, bukan lagi sekadar kebijakan, melainkan manifestasi langsung dari politik kekuasaan personal. Ancaman ini menempatkan Indonesia di persimpangan jalan: tunduk pada tekanan AS yang memimpikan "*Another American First Win*" (seperti yang dituntut AISI dalam isu nikel), atau melawan dengan risiko kehilangan akses pasar vital. Inilah momen krusial di mana analisis makroekonomi dan hukum (seperti kerentanan ekspor atau pelanggaran WTO) mencapai batasnya. Solusi

terhadap krisis ini tidak lagi ditemukan di dalam buku aturan multilateral, melainkan di dalam ruang tertutup negosiasi bilateral yang didominasi oleh dua karakter politik yang sangat karismatik dan kontroversial: Prabowo Subianto dan Donald J. Trump. Keduanya adalah figur populis yang mengandalkan narasi identitas nasional yang kuat (*Nasionalisme Tegas versus MAGA*) .

Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa untuk memahami mengapa negosiasi tarif resiprokal ini berhasil atau gagal dan apa dampaknya terhadap masa depan ekonomi Indonesia, maka harus melampaui analisis kebijakan. Dimana penting memahami bahwa interaksi Prabowo-Trump adalah sebuah Dramaturgi Kekuasaan. Dramaturgi ini adalah pementasan di mana setiap gestur, narasi, dan pertemuan (baik di depan maupun di belakang layar) adalah bagian dari upaya para aktor untuk memanipulasi persepsi dan mencapai tujuan strategis. Prabowo membawa citra seorang patriot dimana patriot adalah individu yang memiliki kecintaan, kesetiaan, dan pengabdian terhadap negaranya serta bersedia membela kepentingan bangsa. Seorang patriot tidak hanya mencintai tanah air secara emosional, tetapi juga menunjukkan komitmen melalui tindakan nyata untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan negara. yang berjuang keras demi hilirisasi dan kedaulatan, sementara Trump membawa retorika pengusaha yang berjanji mengutamakan kepentingan Amerika.

Tujuan inti dari penelitian ini adalah membongkar panggung belakang Diplomasi. Kami akan menganalisis bagaimana Narasi mereka dikonstruksi, bagaimana Representasi personal mereka digunakan untuk menekan atau meyakinkan, dan bagaimana Kekuasaan karismatik mereka menentukan dinamika

meja perundingan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana Indonesia menavigasi tatanan global yang semakin dipersonalisasi dan didominasi oleh politik gaya, bukan hanya kebijakan semata. Inilah panggung yang siap dibongkar oleh penelitian ini: Narasi, Representasi Dan Kekuasaan: Membongkar Dramaturgi Relasi Prabowo Subianto Dengan Donald J. Trump Dalam Negosiasi Tarif Resiprokal Indonesia - Amerika Serikat

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian:

Bagaimana Representasi Narasi dan Relasi Kekuasaan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Trump dalam Negosiasi Tarif Resiprokal Terkait Hubungan Ekonomi Indonesia - Amerika Serikat tahun 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini hadir untuk menganalisis narasi, representasi, dan kekuasaan dalam relasi dramaturgi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Donald J. Trump pada konteks negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia-Amerika Serikat.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui analisis terhadap relasi antara Prabowo Subianto dan Donald J. Trump dalam konteks negosiasi tarif resiprokal Indonesia-Amerika Serikat,

penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana kekuasaan tidak hanya dilakukan melalui kebijakan formal, tetapi juga melalui narasi dan simbol-simbol yang dibangun dalam praktik diplomasi kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis dalam bidang ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang berkaitan dengan studi diplomasi, kekuasaan, dan representasi politik.

1.4.1 Manfaat akademis

Penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap pengembangan kajian Hubungan Internasional dengan mengintegrasikan perspektif sosiologi dalam kajian HI khususnya terkait perang dagang. Pendekatan ini memperluas cara pandang terhadap hubungan antarnegara yang selama ini cenderung bersifat struktural dan institusional menjadi lebih kritis, kultural, dan simbolik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi empiris bagi peneliti lain yang tertarik meneliti fenomena diplomasi berbasis personalitas (*Personified Diplomacy*) serta peran media dalam membentuk persepsi kekuasaan global. Penelitian ini juga berpotensi memperkaya bahan ajar dan literatur di lingkungan akademik, khususnya pada mata kuliah yang berkaitan dengan Teori Hubungan Internasional Kritis, Komunikasi Politik Global, dan Analisis Wacana dalam Politik Internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi (1) Pemerintah Indonesia; (2) Akademisi HI terkait; (3) Ekonom Indonesia; (4) Diplomat Indonesia; (5) Masyarakat Indonesia pentingnya dimensi naratif dan representasional dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Pemahaman ini penting agar strategi diplomasi Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek material dan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kekuatan simbol, bahasa, dan citra yang dapat memengaruhi persepsi global terhadap posisi Indonesia di dunia internasional, serta memberikan manfaat sosial-politik dengan menumbuhkan kesadaran publik akan pentingnya membaca hubungan internasional tidak hanya sebagai pertukaran kepentingan, tetapi juga sebagai pertarungan makna dan representasi yang memengaruhi tatanan dunia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang berisi sub-bab yang disesuaikan dengan pembahasan utama penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah/pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang Representasi Narasi dan Relasi Kekuasaan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump dalam Negosiasi Tarif Resiprokal dari

32% menjadi 19% Terkait Hubungan Ekonomi Indonesia - Amerika Serikat.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini terbagi dalam dua bagian besar, yaitu kajian pustaka dan metode penelitian. Bagian pertama mencakup tinjauan pustaka, kerangka teoritik, operasionalisasi teori, dan hipotesis. Tinjauan Pustaka terbagi dalam lima kelompok, yakni perang dagang US di kawasan Asia, hubungan/konflik tarif Indonesia-US, kajian sosiologi Trump dan Prabowo, melihat Amerika dalam tatanan global dan pendekatan dramaturgi dalam hubungan internasional. Pada kerangka teoritik, peneliti mengadopsi teori dramaturgi oleh Erving Goffman. Teori ini dioperasionisasikan dalam kerangka teoritik untuk menyajikan sebuah metafora yang kuat dan intuitif untuk memahami sifat interaksi sosial dalam penelitian ini. Bagian terakhir subbab ini berupa hipotesis untuk merefleksikan proyeksi peneliti terhadap temuan yang diharapkan.

BAB III PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT-TIONGKOK, MAKE AMERIKA GREAT AGAIN DAN NEGOSIASI PRESIDEN PRABOWO SUBIANTOBILATERAL INDONESIA - AMERIKA SERIKAT

Bab ini terfokus pada perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memengaruhi hubungan ekonomi global, termasuk perdagangan dan investasi di Indonesia. Selain itu, dibahas

kebijakan *Make America Great Again* (MAGA) yang dipopulerkan oleh Donald Trump dan dampaknya terhadap kebijakan perdagangan serta hubungan internasional Amerika Serikat. Bab ini juga menguraikan upaya negosiasi bilateral yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dengan Amerika Serikat untuk memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, dan kepentingan strategis Indonesia di tengah dinamika persaingan global antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

BAB IV NARASI, REPRESENTASI DAN KEKUASAAN: DRAMATURGI RELASI PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO DENGAN PRESIDEN DONALD J. TRUMP DALAM NEGOSIASI TARIF RESIPROKAL INDONESIA- AMERIKA SERIKAT

Bab menganalisis bagaimana narasi, simbol, citra kepemimpinan, dan strategi diplomasi digunakan untuk membangun posisi tawar, memengaruhi persepsi publik, serta mencerminkan dinamika kekuasaan dalam hubungan bilateral kedua negara. Dengan pendekatan dramaturgi, bab ini menyoroti bagaimana para aktor politik menampilkan peran dan kepentingannya di panggung diplomasi internasional guna mencapai tujuan ekonomi dan politik masing-masing.

BAB V PENUTUP

Bab ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai kesimpulan dan rekomendasi terkait dramaturgi relasi Prabowo Subianto dengan Donald J. Trump dalam negosiasi tarif resiprokal.

